

TNI AL Kirim Kapal RS ke Mamuju Sulawesi Barat

JAKARTA (IM) - KRI dr Soeharso-990 dengan dua dua unit helikopter yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut berhasil merapat ke dermaga Pangkalan TNI AL (Lanal) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), kemarin, Senin (18/1).

Merapatnya mereka ke dermaga dalam rangka melaksanakan tugas operasi kemanusiaan membantu para korban bencana alam gempa bumi di Sulawesi Barat.

"Kedatangan Kapal Rumah Sakit TNI AL yang membawa 56 personel Satgas ini disambut langsung Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI, Laksma TNI Benny Sukandari," tulis TNI AL dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) ini membawa barang bantuan berupa,

makanan dan minuman, beras, gula, minyak goreng, teh, kopi bubuk dan obat-obatan, serta material alat kesehatan dan masker.

Selain itu, mereka juga membawa material bangunan seperti, tiang pancang, trafo 33 Unit dan alat bantu lapangan, serta pakaian dan peralatan mandi.

Kemudian, material lain yang dibawa dalam rangka pelaksanaan bantuan medis yaitu tenda serba guna empat unit, tenda pleton empat unit, velbed 30 unit, spre, sarung bantal dan selimut serta sarung tangan serta t-shirt.

Bantuan tersebut berasal Pangkoarmada II, Dispotmar, Diskes Koarmada II, Lantamal V Surabaya, PLN, Dopusbektim, Dispsikologi, Disbekal, alumni AAL angkatan 44 (Moro Cakra) serta PT. Berlian Nusantara. ■ han

MK Kembali Gelar Sidang Uji Materiil UU Ciptaker

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dimohonkan tiga orang advokat.

Berdasarkan lansir laman resmi MK pada item jadwal sidang, tercantum MK akan menggelar sidang lanjutan perkara uji materiil perkara Nomor: 108/PUU-XVIII/2020 pada Selasa (19/1) pukul 10.00 WIB. Ada tiga orang pemohon yang tercantum yakni Ignatius Supriyadi (Pemohon I), Sidik (Pemohon II), dan Jantieri (Pemohon III).

"Pokok Perkara: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Acara: Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)," bunyi informasi singkat di laman resmi MK, seperti dikutip KORAN SINDO dan MNC News Portal, di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Sebelumnya, dalam berkas permohonan yang dilansir MK, tercatat Ignatius Supriyadi, Sidik, dan Jantieri merupakan advokat. Secara keseluruhan, Ignatius Supriyadi, Sidik, dan Jantieri menguji 15 pasal dalam UU

Ciptaker terhadap UUD 1945. Masing-masing yakni Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2, Pasal 114 angka 5, Pasal 124 angka 2, Pasal 150 angka 31, Pasal 151, dan Pasal 175 angka 6.

Para pemohon mendalilkan di antaranya bahwa para pemohon sebagai advokat yang memberikan jasa hukum kepada kliennya merasa berpotensi mengalami kerugian dengan adanya materi atau substansi yang tidak jelas dan pasti.

Para pemohon memohon agar Mahkamah untuk mempercepat proses persidangan dengan alasan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja bersifat lintas sektoral. Apalagi, sekitar 15 kementerian harus mempersiapkan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan dalam UU Ciptaker.

Pada bagian petitem, para pemohon meminta MK memutuskan, di antaranya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya serta pasal-pasal a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai rujukan yang diajukan oleh para pemohon. ■ han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER MENTERI DALAM NEGERI DENGAN KOMISI II DPR

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) bersama Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra (kedua kiri), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kiri) dan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.

Moeldoko Dorong Kodam Agar Ikut Sukseskan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Moeldoko mengapresiasi para Panglima Kodam yang telah menjalankan perannya untuk sukseskan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, sebagai satuan teritorial Kodam memiliki peran sangat strategis dalam sukseskan program vaksinasi.

JAKARTA (IM) - Program vaksinasi Covid-19 salah satu upaya kuat pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Untuk sukseskan program tersebut perlu melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Polri yang memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtibnas).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Babinsa dan Babinkamtibnas berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan, mengawal pendistribusian, hingga pelaksanaan vaksinasi. "Peran serupa pernah sukses saat Indonesia menggelar program vaksinasi polio beberapa tahun silam," ujar Moeldoko saat menggelar rapat koordinasi bersama delapan Panglima Kodam secara daring dari Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (19/1).

Dari pemaparan para Panglima yang hadir, pelaksanaan

vaksinasi Covid-19 di beberapa wilayah berjalan baik tanpa isu penolakan yang signifikan dari masyarakat. Namun, masih ada beberapa catatan dan perlunya perbaikan data melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Menurut Moeldoko, vaksin Sinovac telah melalui uji klinis dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan halal dan suci terhadap vaksin ini.

"Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan keselamatan masyarakat pada prioritas paling tinggi," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada para Panglima Kodam yang telah menjalankan perannya untuk sukseskan vaksinasi Covid-19. Sebagai satuan teritorial, Kodam me-

miliki peran sangat strategis dalam sukseskan program vaksinasi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menuturkannya, pihaknya masih menerima informasi adanya penolakan vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat. Oleh karena itu, KSP mengundang para Panglima Kodam untuk memaparkan laporan dan informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah teritorial masing-masing.

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan, di wilayahnya belum ada penolakan vaksin Covid-19. Terlebih, Kodam Jaya telah menyosialisasikan vaksinasi Covid-19 sebelum pelaksanaan, meskipun masih ditemui adanya hoaks terutama soal kehalalan dan dampak setelah vaksin.

"Kami juga melakukan pendampingan, pelaksanaan dan melakukan pengamanan dan melibatkan Babinsa untuk door to door," jelas Dudung.

Sedangkan Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan perlunya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19. "Kami juga memberi contoh dengan ikut menjadi penerima vaksin dan sampai saat ini sebagian

besar masyarakat di Jawa Barat menerima dan mendukung adanya vaksin," terang Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Sementara itu, Panglima Kodam 19 Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menjelaskan, masyarakat Papua menerima program vaksinasi, meskipun masih ada segelintir

kelompok yang melakukan penolakan. Yogo pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus menyosialisasikan vaksinasi ke masyarakat dan kepada tokoh masyarakat yang masih menolak vaksin. "Tapi perlu sistem informasi satu data sehingga program ini tepat guna dan tepat sasaran," jelas Yogo. ■ mei

KPK Periksa Seorang Pengacara Kerabat Buronan Harun Masiku

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pengacara bernama Daniel Tonapa Masiku, Selasa (19/1). Daniel Tonapa Masiku masih punya hubungan keluarga dengan buronan kelas kakap, Harun Masiku (HM).

Sedanya, Daniel Tonapa diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024, untuk tersangka Harun Masiku.

"Daniel Tonapa Masiku infonya masih ada hubungan keluarga dengan HM. Infonya saksi sudah datang," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (19/1).

Belum diketahui apa yang bakal dialami penyidik terhadap Daniel Masiku, pada pemeriksaan kali ini. Penyidik disinyalir bakal mendalami ihwal keberadaan Harun Masiku yang sudah buron selama setahun lebih.

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan Caleg asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulsaan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR oleh KPK.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ketiganya yakni, mantan Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan (WSE), Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF) serta pihak swasta, Saeful (SAE).

Namun, Harun lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ia berhasil melarikan diri. Ia telah ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020. Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku.

Belakangan ini muncul

rumor kalau Harun Masiku sudah meninggal dunia. Namun rumor ini ditepis KPK, yang menyakini tersangka mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku (HM), masih hidup.

"Apakah statusnya MD (meninggal dunia) atau disembunyikan, terkait MD atau tidak selama kami tidak melihat jenazahnya di mana, maknanya di mana, kuburannya di mana, maka kami menganggap yang bersangkutan saat ini statusnya masih hidup," kata Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Minggu (10/1) lalu.

Diketahui, Harun telah dimasukkan dalam status daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. Karena itu, KPK menganggap belum tertangkapnya Harun sebagai "utang" yang harus dibayar sesegera mungkin oleh para penyidik KPK.

"Itu adalah upaya yang akan dilakukan oleh para penyidik untuk berusaha mencari, menelusuri keberadaan dari HM ini. Merupakan salah satu tanggung jawab yang harus kami selesaikan, kami tuntutkan dengan harapan ini 'utang' dari para penyidik yang harus bisa dibayar dengan cara menemukan, penangkapan kepada HM," ujar Setyo.

Terkait pencarian Harun, KPK juga sebelumnya telah mengevaluasi tim satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab mencari Harun tersebut.

Dalam konferensi pers Kinerja KPK 2020, KPK juga mengakui belum tertangkapnya Harun menjadi salah satu utang yang mendapat perhatian publik. "Hingga saat ini telah dilakukan upaya untuk menangkap tersangka HM melalui koordinasi dengan pihak Bareskrim Polri dan melakukan pemantauan/monitoring keberadaan tersangka HM," kata Wakil Ketua Nawawi Pomolango saat konferensi pers pada 30 Desember 2020. ■ han

KPK Cecar Gubernur Bengkulu soal Usaha Lobster Penyupap Edhy Prabowo

JAKARTA (IM) - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal adanya usaha lobster untuk Direktur PT Dua Putra Sejahtera (DPP) Suharjo (SJT) di Bengkulu. Suharjo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka penyupap Edhy Prabowo

Rohidin diperiksa pada Senin (18/1) kemarin sebagai saksi terkait kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP).

"Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu) dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT DPP yang di ajukan oleh tersangka SJT," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (19/1).

Selain itu, penyidik juga mendalami ihwal adanya rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih benar

untuk PT DPP di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan benih benar untuk PT DPP itu didalam penyidik lewat Bupati Kaur Bengkulu, Gusril Pausi, pada pemeriksaan Senin, 18 Januari 2021, kemarin.

"Gusril Pausi (Bupati Kaur Bengkulu), dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih lobster di Kabupaten Kaur,Bengkulu yang diperuntukkan untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka SJT," ucap Ali.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Ketujuh tersangka itu yakni, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP); Stafus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreu Pribadi Misata (APM).

Kemudian, Pengurus PT

Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF); dan pihak swasta Amiril Mukminin (AM). Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjo (SJT).

Edhy bersama Safri, Andreu Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjo. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya, Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. ■ han



KPK PERIKSA DANIEL TONAPA MASIKU Pengacara Daniel Tonapa Masiku berjalan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/1). Daniel Tonapa Masiku diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku pada perkara kasus dugaan suap kepada bekas Komisiner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

533 Rumah Kebanjiran di Kabupaten Nunukan

JAKARTA (IM) - Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan luapan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Sembakung pada Jumat (8/1) lalu dengan ketinggian permukaan air mencapai 100 sentimeter. Ratusan rumah terendam banjir.

Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan beberapa lokasi terdampak banjir di Kalimantan Utara, antara lain Kecamatan Sembakung, Desa Atap, Desa B. Bagu, Desa Labuk, Desa Pagar, Desa Tujung, Desa M. Bungkul, Desa Lubukan, Desa Tagul, Desa Pelaju, dan Desa Tepian. Hal ini berdasarkan data yang dihimpun pada Selasa 19 Januari 2021 pukul 11.10 WIB.

"Tercatat kerugian materiil antara lain 533 unit rumah terendam, 1 unit masjid terendam, 1 unit posyandu terendam, 1 unit pustu terendam, 115 hektar lahan sawah terendam, 2 hektar lahan kebun terendam yang berdampak pada 2.752 jiwa," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan tertulis, Selasa (19/1).

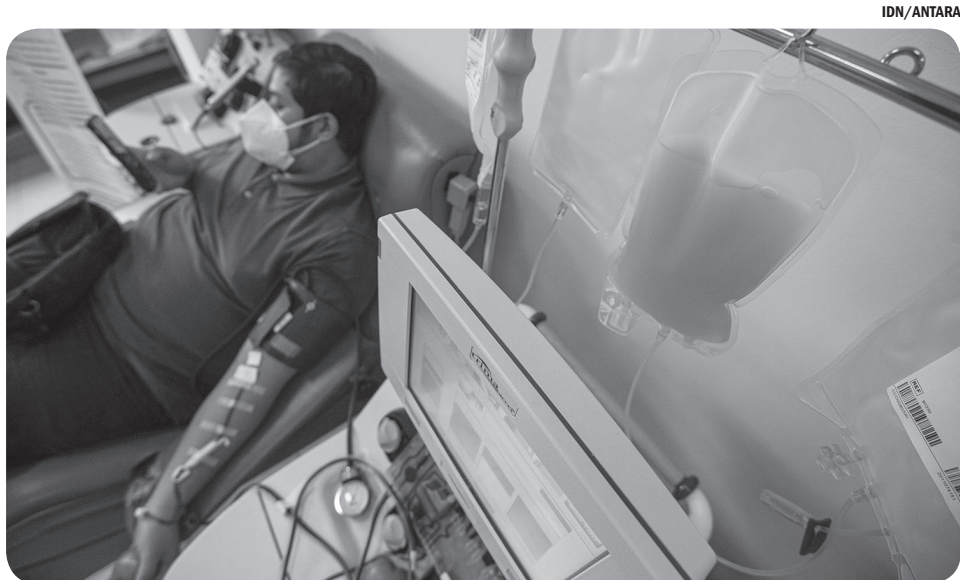
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Nunukan menginformasikan bahwa saat ini sedang melakukan pendataan sekaligus mempersiapkan sarana dan prasarana pengungsian seperti dapur umum untuk para pengungsi.

Selain itu, sambung Raditya, BPBD Kabupaten Nunukan juga memantau kondisi terkini banjir sudah mulai berangsur surut, namun apabila terjadi hujan kembali debit air berpotensi akan kembali naik. Oleh karena itu, BPBD juga melakukan evakuasi warga terdampak banjir dan memberikan imbauan agar warga lebih waspada akan potensi kenaikan debit air sungai yang setiap waktu bisa terjadi.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kabupaten Nunukan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, ditengah musim hujan yang akan terjadi hingga Februari 2021.

"Masyarakat dapat memantau informasi prakiraan cuaca melalui BMKG serta memeriksa potensi bencana di sekitar wilayah melalui InaRisk," katanya. ■ mei



GERAKAN NASIONAL DONASI PLASMA KONVALESEN Penyintas Covid-19 mendonorkan plasma konvalesennya di PMI DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (19/1). Pemerintah mencanangkan donasi plasma konvalesen sebagai gerakan nasional untuk membantu pasien yang masih berjuang untuk sembuh dari Covid-19.

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan secara langsung terhadap sebagian besar saham dari para pemegang saham PT. Clever Trading Indonesia ("Perseroan"), yang berkedudukan di Tangerang Selatan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian Perseroan.

Bagi para pihak yang memiliki tagihan terhadap Perseroan atau keberatan terhadap rencana penjualan saham tersebut, mohon dapat segera menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 20, Bintaro Jaya Sektor 7, Jl. M.H. Thamrin, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Tangerang Selatan, 20 Januari 2021
Ttd.
Direksi
PT. Clever Trading Indonesia

PENGUMUMAN RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI

Sehubungan dengan pembubaran PT JIEN SMELTING INDONESIA (dalam likuidasi) berdasarkan Akta No. 05 tanggal 21 Oktober 2020, dengan ini diumumkan bahwa kami telah menyediakan daftar pembagian kekayaan hasil likuidasi di kantor kami. Pihak yang berkepentingan dapat mengambil daftar tersebut dan mengajukan keberatannya dalam waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada:

Natalriana (Likuidator)
SOHO CAPITAL @Podomoro City Lt. 16 Suite SC-1606A,
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470